

MELALUI CSR SENILAI RP 100 JUTA
BPD DIY Dukung 9 Perpuskal

WONOSARI (KR) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Wonosari menyerahkan *Corporate Social Responsibility* senilai Rp 100 juta kepada 9 Perpustakaan Kalurahan (Perpuskal). Bantuan diserahkan Pemimpin BPD DIY Cabang Wonosari Plati Soulistyanti kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Gunungkidul Drs Ali Ridlo MM dan dihadiri 9 lurah, Jumat (3/7).

"CSR diharapkan mendukung perpustakaan kalurahan berbasis inklusi sosial. Tidak hanya sekedar membaca, namun dikembangkan literasi pembelajaran produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi menurun, BPD DIY mendorong program perpustakaan kalurahan bangkit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga perpustakaan dapat menambah pengetahuan dan membantu pem-



Plati Soulistyanti menyerahkan CSR kepada Drs Ali Ridlo MM.

da Gunungkidul dalam mengurangi angka kemiskinan," kata Plati Soulistyanti. Salah satu penerima CSR yakni Perpustakaan Balai Pintar Kalurahan Pengkol yang akan mewakili DIY maju lomba tingkat nasional. Untuk perpustakaan lain berasal dari Kalurahan Kepek, Semanu, Sambirejo, Dengok, Wonosari, Ngalang, Bejiharjo dan Bedoyo. Drs Ali Ridlo menambahkan, banyak perpustakaan kalurahan dikembangkan berbasis inklusi.

Artinya tidak hanya

pinjam buku, tetapi melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Baik itu pengolahan makanan lokal sesuai potensi hingga seni budaya. Termasuk pelatihan Bahasa Inggris, pemasaran *online*. Menyesuaikan potensi wilayah.

"CSR BPD DIY sangat bermanfaat mendukung sarana prasarana teknologi. Perpustakaan kini dikembangkan informasi komunikasi baik membaca buku maupun internet. Agar muncul ide, ilmu, wawasan dan gagasan," jelasnya. (Ded)-a

WONOSARI (KR) - Ratusan warga di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul kaget lantaran identitas mereka dicatut untuk lampiran dukungan pencalonan bakal pasangan calon bupati wakil bupati dari jalur perseorangan (independen).

Meskipun belum ada sikap akibat dugaan pemalsuan tersebut para warga yang merasa namanya dicatut langsung membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada calon wabup/wacabup dari jalur independen. "Terdapat sekitar 150 warga lebih yang namanya dicatut untuk dukungan pencalonan bupati/wakil bupati dari jalur independen," kata

ketua Lembaga Masyarakat Peduli Pelayanan Pemerintah untuk Publik (LMP-3P) Rongkop, Ali Suyatmo Jumat (3/7).

Ratusan surat pernyataan dan bantahan tidak pernah melakukan dukungan tersebut selanjutnya diserahkan kepada petugas verifikasi lapangan yang mendatangi mereka untuk verifikasi faktual.

Ketua PPS setempat Kingkin ketika dikonfir-

masi tidak bersedia menanggapi adanya hal tersebut dan menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Kalurahan Karangwuni Kapanewon Rongkop ini bukan ranah untuk menanggapi.

Terpisah, Komisioner Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Sudarmanto menyatakan bahwa sesuai regulasi pihaknya turut mengawasi proses tahapan verifikasi faktual pendukung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan dan memastikan sesuai regulasi.

Adapun hal tersebut meliputi ketepatan waktu, ketaatan prosedur, kelengkapan dan kebenaran. Jika dalam waktu 14 masa virtual terjadi dugaan ke-

salahan atau pihaknya akan melakukan proses saran perbaikan yang di atur sesuai Surat Edaran (SE) Nomor : 0370 dan apabila setelah tanggal 12 Juli 2020 ada temuan atau laporan bisa akan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

Dalam proses virtual ini memang terdapat potensi pelanggaran diantaranya dukungan ganda paslon perseorangan, manipulasi dukungan calon perseorangan, dokumen palsu, netralitas penyelenggara pemilihan serta netralitas ASN, TNI, Polri, Perangkat Desa (pamong kalurahan) dan Lurah. "Sampai saat ini belum ada temuan karena masih dalam proses," terangnya. (Bmp)-a

Dispar Bangkitkan 11 Kalurahan Wisata

PENGASIH (KR) - Kabupaten Kulonprogo termasuk penyanga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Karena itu Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo didorong untuk membangkitkan kalurahan (desa) wisata yang dikelola secara mandiri atau swadaya masyarakat dalam rangka membangkitkan potensi lokal. Saat ini ada 11 kalurahan (desa) wisata yang telah berkembang dengan cukup baik. "Dinas Pariwisata, kami dorong untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengembangkan potensi wisata lokal serta memberikan pengakuan berupa legalitas surat keputusan bupati atas keberadaan kalurahan (desa) wisata tersebut," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi ST, Jumat (3/7).

Ada 11 kalurahan wisata yaitu di Kapanewon Samigaluh (Nginggo, Sidoharjo, Tinalah Purwoharjo),

Kapanewon Lendah (Sidorejo), Kalibawang (Banjaroya, Banjarasri, Dekso Banjararum), Girimulyo (Purwosari, Jatimulyo), serta Kokap (Sermo Hargowilis, Kalibiru). Tetapi ke-11 kalurahan wisata tersebut diakui dengan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata.

Pembangunan jalan Bedah Menoreh hingga 2022 ditargetkan selesai, kata Hamam, diyakini bisa memperlancar akses Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) menuju Candi Borobudur melalui puluhan potensi wisata alam yang ada di perbukitan menoreh Kulonprogo. Masyarakat animonya terhadap potensi wisata ini ditunjukkan maraknya spot wisata buatan swadaya masyarakat.

"Pemkab seharusnya melalui Dinas Pariwisata mendukung peluang itu secara serius dengan menata termasuk mendorong pemerintah kalurahan ikut menggarap sektor wisata. Kalurahan yang memiliki

potensi wisata alam maupun budaya yang memiliki daya tarik wisata dipetakan dan dikaji untuk ditetapkan sebagai kalurahan wisata. Tujuannya agar kebijakan pembangunan wisatanya menjadi prioritas," tandas Hamam.

Hamam meyakini cukup banyak desa di Kulonprogo yang memenuhi kriteria sebagai kalurahan wisata. Selain memiliki keindahan alam banyak pula atraksi budaya yang dimilikinya unik dan menarik. Kulonprogo bisa disebut "kabupaten jamu" karena produksi empon-empon terbesar di DIY. Ini bisa menjadi potensi ekonomi pada pandemi Covid-19 yang bisa dikembangkan sejalan dengan pengembangan kalurahan wisata.

"Pemkab Kulonprogo tinggal keberaniannya untuk mengikuti kehendak masyarakat yang telah sejalan lebih awal dengan swadaya bangkitkan wisatanya," ucap Hamam. (Wid)-a

BLT Belasan Kalurahan Belum Dicairkan

WONOSARI (KR)-Belum seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap kedua akibat terkendala teknis. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPAKBPMD) meminta agar bantuan tersebut bisa segera disalurkan agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari update terakhir ini masih ada 14 kalurahan dari sebanyak 144 kalurahan yang masih belum menyalurkan bantuan untuk bulan Juni lalu. "Tertundanya penyaluran bantuan tersebut lantaran adanya sejumlah faktor, mulai dari kesibukan membantu penyaluran bantuan jenis lain dan beragam ketugasan lainnya termasuk adanya kendala teknis," kata Kepala DP3AKBPMD Gunungkidul Sudjoko SSos MSI, Jumat (3/7).

Meskipun masih ada belasan

kalurahan yang belum menyerahkan BLT untuk pereode Juni 2020 tetapi dilihat berdasarkan progress yang terjadi sudah cukup bagus lantaran pada beberapa hari yang lalu masih ada sekitar 40 persen atau sekitar 50 Kalurahan yang belum melakukan penyaluran BLT. Masih adanya sejumlah kalurahan yang belum bisa menyalurkan bantuan ini hendaknya bisa dimaklumi lantaran cukup banyak pekerjaan yang harus diampu pemerintah kalurahan. (Bmp)-a

107 Klien Bapas Wonosari Dibantu Sembako



Penyerahan sembako kepada klien.

WONOSARI (KR) - Sebanyak 107 klien Balai Masyarakatan (Bapas) Wonosari menerima bantuan sembako. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Sosial DIY bersama Divisi Masyarakatan Kantor Wilayah Kemenkum HAM DIY. Upaya ini sebagai du-

kungan dan ikut menanggulangi dampak Covid-19. "Melalui bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban klien," kata Kepala Divisi Masyarakatan Kanwil KemenkumHAM DIY Gusti Ayu Putu Suardani BcIP SH MSI di dampingi

Kasubid Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Mirna Pandanwangi SH.

Kepala Bapas Wonosari Surya Dharma BcIP SH, Jumat (3/7) menambahkan, tentunya bantuan sembako ini bermanfaat bagi klien. Bapas menyampaikan terimakasih atas perhatian Divisi Masyarakatan dan Dinas Sosial karena telah memberikan bantuan bagi para klien. Sebagian besar memang merupakan klien asimilasi. Untuk pengawasannya tetap dilakukan pemantauan dan pengawasan seluruh kegiatan klien. Termasuk memberikan laporan secara rutin kepada Kanwil KemenkumHAM. "Klien yang berada di rumah ini tetap dilakukan pemantauan maupun pengawasan," ujarnya. (Ded)-a

Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

WATES (KR) - Masyarakat Kulonprogo dianjurkan memotong hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1441 H di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Sesuai Surat Edaran (SE) Bupati setempat Drs H Sutedjo, nomor 451/1919 tentang Ketentuan Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah/ 2020 Masehi Dalam Situasi Bencana Covid-19. "Kalau panitia kurban tetap ingin melaksanakan penyembelihan di luar RPH-R maka harus mendapat izin Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo Ir Aris Nugroho, kemarin.

Diungkapkan agar masyarakat bisa mendapatkan surat rekomendasi maka harus mengajukan permohonan melalui *online* atau manual. Cara *online* bisa dilihat di website TaniKu yang dikelola Di-

nas Pertanian dan Pangan Kulonprogo. Sementara bagi yang memilih cara manual, bisa datang langsung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sesuai domisili pemohon. Selain tempat pemotongan, tempat penjualan hewan juga harus mendapat rekomendasi dari dinas tersebut. Prosedur mendapat surat rekomendasi itu sama dengan tempat pemotongan hewan.

"Tempat penjualan hewan kurban juga harus ada rekomendasi dari dinas yang menerangkan tempat dimaksud memenuhi unsur protokol pencegahan Covid-19," tuturnya.

Dinas Pertanian dan Pangan akan mensosialisasikan masalah surat rekomendasi bagi tempat penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dan penjual hewan kurban dengan melibatkan pemerintah kapanewon dan kalurahan. (Rul)-a

WATES (KR)-Adanya pandemi Covid-19 harga maupun permintaan terhadap hewan kurban belum ada lonjakan. Permintaan justru cenderung menurun.

"Harga yang dipatok lebih murah 10 persen dibanding tahun lalu. Saat ini banyak sekolah yang tidak memotong hewan kurban sehingga permintaan berkurang pula. Karena ada sekolah yang mengadakan kurban dan tidak," ujar Nur Qhan Priyanto dan Sutarnan, peternak sapi dan kambing di Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates, kemarin.

Saat ini sapi milik Priyanto sudah dipesan masjid-masjid untuk kurban. Sementara kambing milik Sutarnan masih fokus un-



Peternakan sapi milik Priyanto.

tuk memenuhi permintaan sejumlah warung sate.

"Harga sapi untuk kurban berkisar Rp 21 juta hingga Rp 24 juta. Ini dasar postur tubuh sapi, tinggi, panjang, dan gemuk. Sapi kurban milik saya

adalah hasil penggemukan selama tiga sampai empat bulan. Setelah Idul Adha kandang akan kosong dan tiga sampai empat bulan membeli anak sapi kembali," ucap Priyanto, pemilik Kandang 'Berkat Saudara'

sambil menambahkan, bahwa untuk menghasilkan sapi berkualitas dibutuhkan perawatan yang baik.

Sementara Sutarnan yang seorang jagal dan peternak kambing mengungkapkan, harga kambing juga tidak mengalami lonjakan sejak bulan Februari 2020 hingga saat ini.

"Diperkirakan satu ekor kambing kurban yang kecil berkisar Rp 1,6 juta sampai 1,8 juta dari peternak. Sedangkan kambing berukuran besar harganya lain lagi. Saya optimis permintaan kambing kurban meningkat pada hari-hari mendekati Idul Adha, meskipun sedang terjadi pandemi Covid-19," tuturnya. (Wid)-a